

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi mengenai permukiman berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan. Kebutuhan permukiman seringkali tidak cukup tersedia secara memadai karena keterbatasan pelayanan kota di mana permukiman tersebut berada. (M. Yahya Siradjuddin, 2018). Sehingga kebutuhan akan permukiman mempengaruhi arah perkembangan permukiman.

Perkembangan permukiman menurut (Pratiwi Husin Dkk, 2017) pada daerah perkotaan dan perdesaan yang semakin berkembang, diikuti dengan kebutuhan lahan yang semakin meningkat. Dari kondisi tersebut, maka akan berdampak terhadap penggunaan lahan dan tutupan lahan yang semakin tinggi. Selain berdampak pada kondisi penggunaan lahan, perkembangan permukiman juga berdampak pada kepadatan penduduk, dimana biasanya hal tersebut terjadi karena adanya urbanisasi dan keterbatasan lahan (Niken Dyah Nawang Wulan Dkk, 2020). Pertumbuhan penduduk yang demikian pesat kemudian diikuti dengan perkembangan tempat bermukim yang juga demikian pesat untuk memenuhi pertumbuhan penduduk, berbagai masalah terutama yang berakitan dengan lingkungan tempat hidup manusia (Agung Witjaksono Dkk, 2021). Tentunya hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan pada aspek permukiman.

Permasalahan mendasar permukiman adalah adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan penyediaan, rendahnya daya beli masyarakat, maupun kelayakan lokasi untuk pengembangan permukiman (Agung Witjaksono dan Ida Soewarni, 2006). Permasalahan pada aspek permukiman dalam lingkup nasional menjadi prioritas tersendiri untuk dilakukannya penanganan. Dari data yang didapat dari SUSSENAS Tahun 2019, pada aspek *backlog* permukiman dalam lingkup nasional diketahui bahwa masih terdapat 38,9% (15,5 juta rumah tangga) perkotaan yang tinggal di rumah tidak layak huni, dan dapat dipastikan sebagian rumah tangga tersebut menempati permukiman kumuh. Capaian tersebut berdasarkan empat indikator rumah layak huni yang diadaptasi dari indikator UNHabitat, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum, dan akses sanitasi. Masalah mengenai aspek permukiman tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional,

namun berhirarki dari lingkup provinsi sampai lingkup Kab/Kota menurut (Sadana,2014).

Selain masalah permukiman dalam lingkup nasional, permasalahan aspek permukiman juga terjadi pada Provinsi Kalimantan Utara. Dimana berdasarkan data yang didapat dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, dalam rangka pemenuhan pembangunan/pengembangan permukiman terus diusahakan dengan kegiatan pengembangan kawasan permukiman seluas 754.677 km² yang tersebar di semua Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan juga penanganan permukiman kumuh seluas 186 hektar berdasarkan data dari SK Kumuh di masing-masing Kabupaten/Kota yang sudah tertangani seluas 146 hektar dalam kurun waktu (2015-2018). Hal tersebut selaras dengan salah satu visi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara yaitu ”terciptanya kawasan permukiman yang layak dan sehat, pengelolaan sanitasi, drainase dan persampahan yang baik serta terciptanya kawasan perkantoran”. Pengembangan aspek permukiman harus diintegrasikan terhadap wilayah yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga kedepannya dapat meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi baik dalam lingkup provinsi maupun kab/kota.

Kabupaten Tana Tidung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional. Tipologi wilayah yang ditetapkan sebaga PKW salah satunya adalah merupakan perkotaan skala sedang dan juga mampu mengakomodir pertumbuhan provinsi. Tidak dipungkiri bahwasannya proses perkembangan wilayah Kabupaten Tana Tidung sebagai PKW, tentunya tidak terlepas dari pertumbuhan aspek permukiman sebagai penunjang sebuah perkotaan. Lebih dijelaskan lagi dalam pembahasan mengenai tujuan penataan ruang Kabupaten Tana Tidung yang didapat dari RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032, dimana salah satu tujuan penataan ruang Kabupaten Tana Tidung adalah “Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong; pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang”. Hal tersebut tentunya juga tidak terlepas dari aspek pengembangan permukiman sebagai salah satu bagian dari kawasan budidaya yang dimana meliputi meningkatkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman perdesaan.

Salah satu komponen dari permukiman yang disampaikan oleh (Silas dkk,2001) adalah komponen daya dukung dan daya tampung. (Listyawati,2015) mengartikan daya dukung dan daya tampung sebagai batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi dimana jumlah populasi tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada. Kondisi daya dukung dan daya tampung sangat besar pengaruhnya terhadap

keberadaan dan pertumbuhan permukiman baru. Jika tidak diperhitungkan daya dukung dan daya tampung yang mampu dihasilkan dan mampu dibebankan pada suatu wilayah, maka pada akhirnya akan menimbulkan problematika keruang wilayah itu sendiri. Ruang memiliki keterbatasan atau yang disebut *carrying capacity* dalam meyangga kebutuhan manusia, demikian pula kebutuhan akan permukiman. Sehubungan dengan itu, maka menjadi sangat penting untuk diketahui daya dukung dan daya tampung permukiman agar dapat dilakukan pengendalian terhadap pertumbuhan permukiman yang di kemukakan oleh (Sutomo, 2019). Tentunya ketika sebuah permukiman tumbuh tanpa memperhitungkan daya dukung dan daya tampung yang mampu dihasilkan dan yang mampu dibebankan pada suatu kawasan atau wilayah yang dijadikan permukiman tersebut, nantinya hal tersebut akan mengganggu proses perkembangan yang ada di wilayah tersebut.

Perhitungan mengenai daya dukung pada dasarnya menggunakan pendekatan kesesuaian lahan yang berisikan kelerengan, jenis tanah, curah hujan dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan. Tujuan dari metode ini adalah sebagai batasan dalam menganalisa daya dukung agar dapat memperhitungkan kondisi eksisting sebagai batasan dalam memperhitungkan kemampuan penduduk untuk bermukim. Sedangkan untuk pendekatan dengan menggunakan daya tampung lebih menitikberatkan pada dampak apakah suatu wilayah dapat menampung penduduk untuk bermukim. Lebih rinci mengenai aspek daya dukung kawasan permukiman yang termuat didalam beberapa pedoman maupun sumber lainnya, pada dasarnya digunakan untuk mengetahui tingkat ambang batas permukiman yang mampu didukung oleh komponen pendukung pada suatu wilayah serta beban yang mampu ditampung oleh wilayah tersebut untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman maupun kawasan permukiman yang sudah ada (Nurmantyo, 2017). Oleh karenanya perlu adanya perhitungan daya dukung dan daya tampung khususnya daya tampung permukiman sebagai salah satu aspek komponen penunjang wilayah.

Oleh karena itu urgensi dari penelitian kali ini, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, merupakan implementasi dari bentuk antisipasi terhadap kemungkinan perkembangan permukiman-permukiman baru yang akan terjadi di Kabupaten Tana Tidung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan arahan dari RTRW Nasional, dan juga sebagai salah satu dasar untuk perencanaan ataupun pengembangan permukiman baru pada Kabupaten Tana Tidung sehingga hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung tersebut dapat dijadikan batasan pengembangan sehingga tercipta lingkungan permukiman yang bisa dikatakan berkelanjutan karena sangat menitikberatkan kemampuan daya dukung dan daya tampung wilayah yang akan dikembangkan. Dari hal

tersebut kemudian bisa ditindaklanjuti sehingga perkembangan permukiman Kabupaten Tana Tidung kedepannya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung yang dimiliki Kabupaten Tana Tidung untuk mendukung dan menampung permukiman serta dapat meminimalisir dampak negatif dari perkembangan permukiman-permukiman baru yang tidak terkontrol dan dapat mengganggu fungsi keberlanjutan Kabupaten Tana Tidung kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, Kabupaten Tana Tidung ditetapkan sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Nasional dan juga RTRW Provinsi. Dengan ditetapkannya Kabupaten Tana Tidung sebagai PKW mengharuskan Kabupaten Tana Tidung untuk dapat mengakomodir kepentingan dalam lingkup provinsi. Selain itu wilayah yang ditetapkan sebagai PKW, harus memiliki beberapa standar atau tipologi salah satunya adalah perkotaan skala sedang dan juga mampu mengakomodir pertumbuhan provinsi. Selain dari ditetapkannya Kabupaten Tana Tidung sebagai PKW dalam RTRW Nasional dan Provinsi, kebijakan pengembagan permukiman juga tertuang dalam aspek tujuan penataan ruang Kabupaten Tana Tidung yang didapat dari RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032, dimana salah satu tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Tana Tidung adalah “Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong; pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang”.

Peningkatan fungsi sebagai PKW dan juga pengoptimalan potensi lahan budidaya yang beroutput pada pengembangan perkotaan-perkotaan baru yang terdapat komponen permukiman dan sarana prasarana pendukung, tentunya harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, mengingat sifat dari setiap ruang yang ada di Kabupaten Tana Tidung pada dasarnya memiliki keterbatasan atau *carrying capacity*. Sehingga dengan mempertimbangkan keterbatasan dari setiap ruang akan tercapai perkotaan-perkotaan baru yang berkelanjutan untuk mendukung fungsi wilayah Kabupaten Tana Tidung sebagai PKW dan juga untuk mengakomodir intervensi dari RTRW Kabupaten yang mengharuskan adanya pengoptimalan kawasan budidaya. Oleh Karena itu perlu adanya bentuk antisipasi untuk mendukung Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan kepentingan nasional, provinsi dan kabupaten sendiri yang tidak terlepas dari memperhitungkan terlebih dahulu daya dukung dan daya tampung yang dimiliki Kabupaten Tana Tidung untuk pengembangan permukiman kedepannya. Sehingga dengan diketahuinya daya dukung dan daya tampung yang dimiliki Kabupaten Tana Tidung, maka akan terdapat batasan pengembangan dengan didasarkan pada daya dukung dan daya tampung yang dimiliki sehingga dapat tercapai aspek keberlanjutan.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Adapun Tujuan dan Sasaran dalam penelitian ini yang berjudul “Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Pengembangan Permukiman di Kabupaten Tana Tidung” dapat dilihat pada pembahasan berikut ini.

1.3.1 Tujuan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk “Mengetahui daya dukung dan daya tampung pengembangan permukiman di Kabupaten Tana Tidung di masa yang akan datang”.

1.3.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas maka sasaran yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa Aspek Kesesuaian Lahan dan Aspek Kependudukan Sebagai Data Masukan Perhitungan Daya Dukung pada Kabupaten Tana Tidung.
2. Menganalisa Daya Dukung Pengembangan Permukiman di Kabupaten Tana Tidung.
3. Menganalisa Daya Tampung Pengembangan Permukiman di Kabupaten Tana Tidung.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan suatu batasan-batasan dalam membahas penelitian, ruang lingkup terbagi menjadi dua yaitu lingkup wilayah dan lingkup materi. Adapun penjelasan terkait ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup materi sebagai berikut.

1.4.1 Ruang Lingkup Lokasi

Dalam menentukan lokasi penelitian perlu adanya pertimbangan dalam pengambilan lokasi penelitian terkait dengan tujuan dan kondisi lokasi penelitian, sehingga dalam kelanjutannya nanti dapat memperlancar proses penelitian. Pada lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Tana Tidung, adapun penjelasannya sebagai berikut.

Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah administrasi seluas 4.828,58 km². Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang secara astronomi terletak diantara 116° 42' 50 – 117° 49' 50 Bujur Timur dan 3° 46' 41' Lintang Utara. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut.

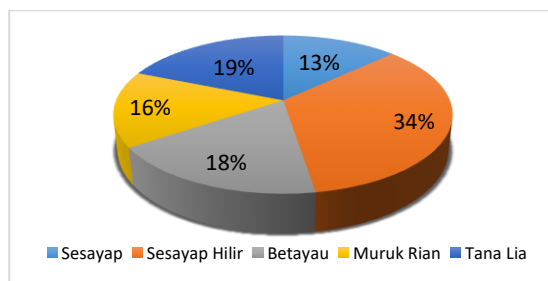
Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan.
Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan.
Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan.
Sebelah Barat : Kabupaten Malinau.

Wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 kecamatan dan 29 desa. Yaitu Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Betayau, Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Tana lia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Luas Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa
1	Sesayap	97.671	7
2	Sesayap Hilir	257.149	7
3	Betayau	135.503	6
4	Muruk Rian	116.502	6
5	Tana Lia	140.879	3
Total		747.704	29

Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2020



Gambar 1.1 Diagram Presentase Luas Wilayah Tiap Kecamatan

Secara umum Kabupaten Tana Tidung termasuk kabupaten baru yang berhasil mengalami pemekaran (Undang-undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara) Adapun urgensi dalam pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan, sebagai wilayah yang masih dalam tahap berkembang, Kabupaten Tana Tidung diharapkan mampu mengakomodir dampak dari perkembangan wilayah yang terjadi pada Kabupaten Tana Tidung salah satu dari dampak perkembangan wilayah yaitu perkembangan permukiman. Sehingga kedepannya pengembagan permukiman-permukiman baru yang akan terbentuk di Kabupaten Tana Tidung menjadi permukiman yang *suistainable*. Oleh karena itu penelitian kali ini bertujuan untuk mengkajian terkait dengan pengembangan permukiman yang berkelanjutan kedepannya yang ditinjau erlebih dahulu pada aspek daya dukung dan daya tampung pada aspek perkembangan permukiman

berkelanjutan . Adapun peta terkait lokasi amatan penelitian ini dapat dilihat pada peta 1.1.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah daya dukung dan daya tampung di permukiman Kabupaten Tana Tidung di masa yang akan datang dengan batasan-batasan materi yang akan dibahas tidak terlepas dari aspek permukiman. Kabupaten Tana Tidung ditetapkan sebagai Pusat kegiatan wilayah (PKW) dalam sistem perkotaan pada RTRWN dan RTRWP sebagai wilayah yang ditetapkan sebagai PKW maka harus mampu mengakomodir kepentingan dalam lingkup provinsi.

Adapun standar PKW (Pusat kegiatan wilayah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Nasional terakait aspek permukiman. Sehingga ditetapkan menjadi beberapa kriteria yaitu :

- Mempunyai peranan sebagai satu sistem kota atau beberapa sub-sistem kota
- Mempunyai kawasan perkotaan sedang atau dengan jumlah penduduk yang dilayaninya minimal 100.000
- Memiliki prasarana dan sarana distribusi pangan/energi/komunikasi
- Memiliki Rumah Sakit umum tipe B / dengan skala pelayanan untuk jumlah penduduk tingkat provinsi atau beberapa kabupaten
- Memiliki perguruan tinggi tingkat S1 dan/atau akademi diploma 3
- Memiliki pusat pelayanan perdagangan dan perkantoran skala layanan tingkat provinsi atau beberapa kabupaten
- Memiliki kegiatan pelayanan jasa keuangan lingkup provinsi dan nasional

Kemudian setelah dikaji lebih lanjut pada RTRW Kabupaten Tana Tidung bahwa Standar dan Kriteria PKW (Pusat kegiatan wilayah) yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Nasional. Bahwa terdapat beberapa fungsi dan peran yang harus diakomodir oleh Kabupaten Tana Tidung terkait aspek permukiman yaitu :

- Pengembangan pusat pemerintahan terpadu/*block office*
- Pengembangan sarana dan prasarana penunjang permukiman skala Kabupaten dan Regional
- Pengembangan pasar grosir, pusat perbelanjaan dan atau pasar induk

Namun sebagai langkah antisipasi untuk membatasi pengembangan permukiman di wilayah penelitian maka harus dihitung terkait dengan daya

dukung dan daya tampung pada Kabupaten Tana Tidung sehingga nantinya pengembangan permukiman akan sesuai dengan nilai daya dukung dan daya tampung yang mampu ditampung penduduk nya pada wilayah penelitian .Adapun Potensi pengembangan permukiman di masa yang akan datang dengan menggunakan kondisi ekisisting permukiman pada Kabupaten Tana Tidung yang tersedia. Kemudian menggunakan analisa proyeksi penduduk untuk mengetahui kondisi permukiman. Sehingga tujuan utama yaitu mengetahui kondisi daya dukung dan daya tampung pengembangan permukiman.

Penelitian ini berfokus pada aspek spasial yang berupa fisik dan sosial dengan perhitungan daya dukung dan daya tampung pada permukiman serta ada pengembangan permukiman di Kabupaten Tana Tidung. Terkait dengan daya dukung dan daya tampung pengembangan permukiman yaitu aspek yang dibahas adalah kemampuan penduduk untuk bermukim pada wilayah penelitian.

Sebagai acuan pada penelitian ini akan berfokus pada materi Teori Kependudukan Buku Pedoman Penghitungan Proyeksi Penduduk dan Angkatan Kerja, 2010 yang berisi pada Proyeksi penduduk yaitu penghitungan ilmiah yang didasarkan komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang.

Selanjutnya materi yang digunakan yaitu Teori Permukiman yang dikemukakan oleh Ekartaji, 2013:25 mengenai Kualitas lingkungan permukiman dipengaruhi kondisi permukiman seperti kepadatan bangunan, keteraturan bangunan, ketersediaan fasilitas lingkungan seperti ruang terbuka hijau atau taman. Kemudian peneliti akan menggunakan variabel kondisi permukiman.

Sebagai masukan pada materi selanjutnya yaitu akan menggunakan teori dari Wijaya, 2003 yaitu Teori Daya Tampung yaitu Daya tampung mengandung dua komponen utama, yaitu ketersediaan potensi sumberdaya alam dan daya tampung. Aspek sumberdaya alam meliputi unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumberdaya hayati maupun non hayati, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia; sedangkan daya tampung merupakan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 tahun kedepan dengan mempertimbangkan waktu optimalnya waktu perencanaan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dibagi menjadi 3 jenis yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Dengan hal ini menjadi dasar kenapa penelitian ini

dirincikan daya dukung dan daya tampung per 5 tahunan, sehingga dengan diketahuinya daya dukung dan daya tampung yang dimiliki Kabupaten Tana Tidung, akan terdapat batasan pengembangan dengan didasarkan pada daya dukung daya tampung.

1.5 Keluaran dan Manfaat Penelitian

Pada pembahasan sub bab ini, akan membahas mengenai seberapa jauh kegunaan, kontribusi dan hasil penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini. Adapun pembahasan pada sub bab keluaran dan manfaat dapat lihat pada pembahasan berikut.

1.5.1 Keluaran Penelitian

Keluaran penelitian yang diharapkan dari penelitian dengan judul “Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman di Kabupaten Tana Tidung” berdasarkan dengan sasaran telah ditetapkan. Adapun keluaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Teranalisisnya kependudukan sebagai data masukan perhitungan daya dukung pada Kabupaten Tana Tidung.
2. Teranalisisnya daya dukung pengembangan permukiman di Kabupaten Tana Tidung .
3. Teranalisisnya daya tampung pengembangan permukiman di Kabupaten Tana Tidung.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini terdapat tiga manfaat yang akan dijabarkan, diantaranya akan terbagi menjadi tiga manfaat yakni manfaat bagi pemerintah, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.5.2.1 Manfaat Bagi Pemerintah

Manfaat dalam penelitian yang dilakukan adalah untuk memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Tana Tidung khususnya yang berwenang menangani masalah lingkungan permukiman yakni berupa masukan agar daya dukung dan daya tampung lahan permukiman dimasa yang akan datang sehingga dapat menjadi masukan untuk pemerintah setempat dalam mengambil keputusan dalam menentukan pembangunan permukiman yang sesuai. Dengan adanya penelitian ini harapannya agar dapat menyelesaikan masalah mengenai daya dukung dan daya tampung permukiman di Kabupaten Tana Tidung.

1.5.2.2 Manfaat Bagi Masyarakat

Manfaat yang didapatkan masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat bisa mengetahui pentingnya Daya Dukung dan Daya Tampung pada daerah penelitian, sehingga masyarakat di Kabupaten Tana Tidung dapat

mempertimbangkan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.

1.5.2.3 Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti sendiri maupun peneliti selanjutnya dari disusunnya penelitian terkait daya dukung dan daya tampung permukiman di Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

1. Melatih peneliti untuk menerapkan ilmu dan metode-metode terkait dengan analisis daya dukung dan daya tampung yang didapatkan selama masa perkuliahan dengan studi kasus analisis daya dukung dan daya tampung permukiman.
2. Memberi masukan kepada pemerintah setempat terkait dengan beberapa analisis yang dihasilkan pada penyusunan penelitian ini untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lahan permukiman dimasa yang akan datang di Kabupaten Tana Tidung.

1.6 Kerangka Pikir

Dalam penelitian tentang Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Pengembangan Permukiman di Kabupaten Tana Tidung memiliki kerangka pikir, adapun kerangka pikir dalam penyusunan dapat dilihat pada Gambar Bagan berikut.

1.7 Sistematika Pembahasan

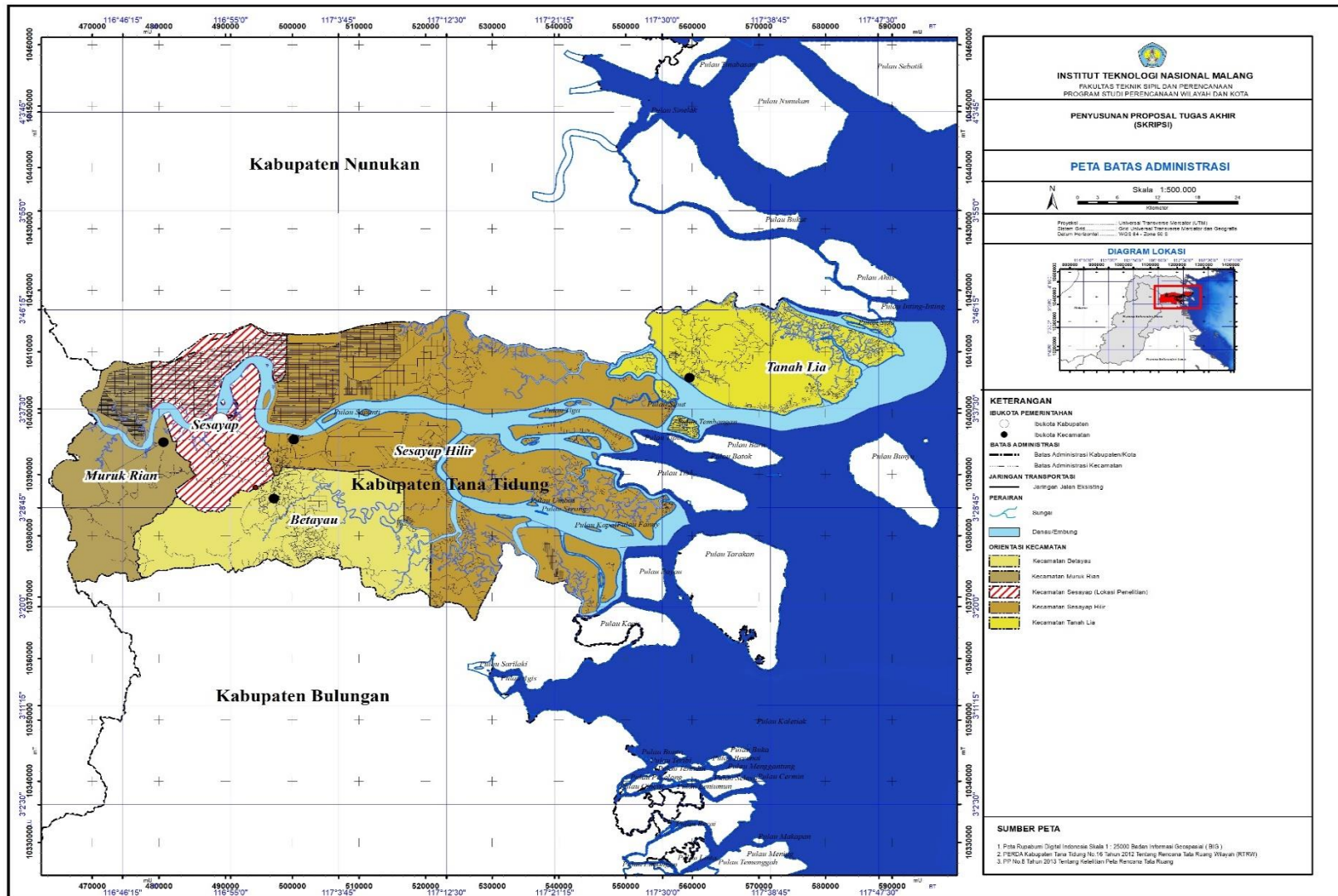
Sistematika pembahasan dimaksudkan adalah untuk membahas mengenai garis besar bab yang akan dibahas didalamnya. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini dijelaskan rinci sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan : bab ini berisi latar belakang tujuan serta sasaran yang ingin dicapai pada penelitian ini dilakukan, tahapan proses yang sudah dilakukan, sistematika penulisan, keluaran yang ingin dicapai oleh peneliti nanti nya dan manfaat apa saja yang akan diberikan oleh hasil penelitian tersebut.

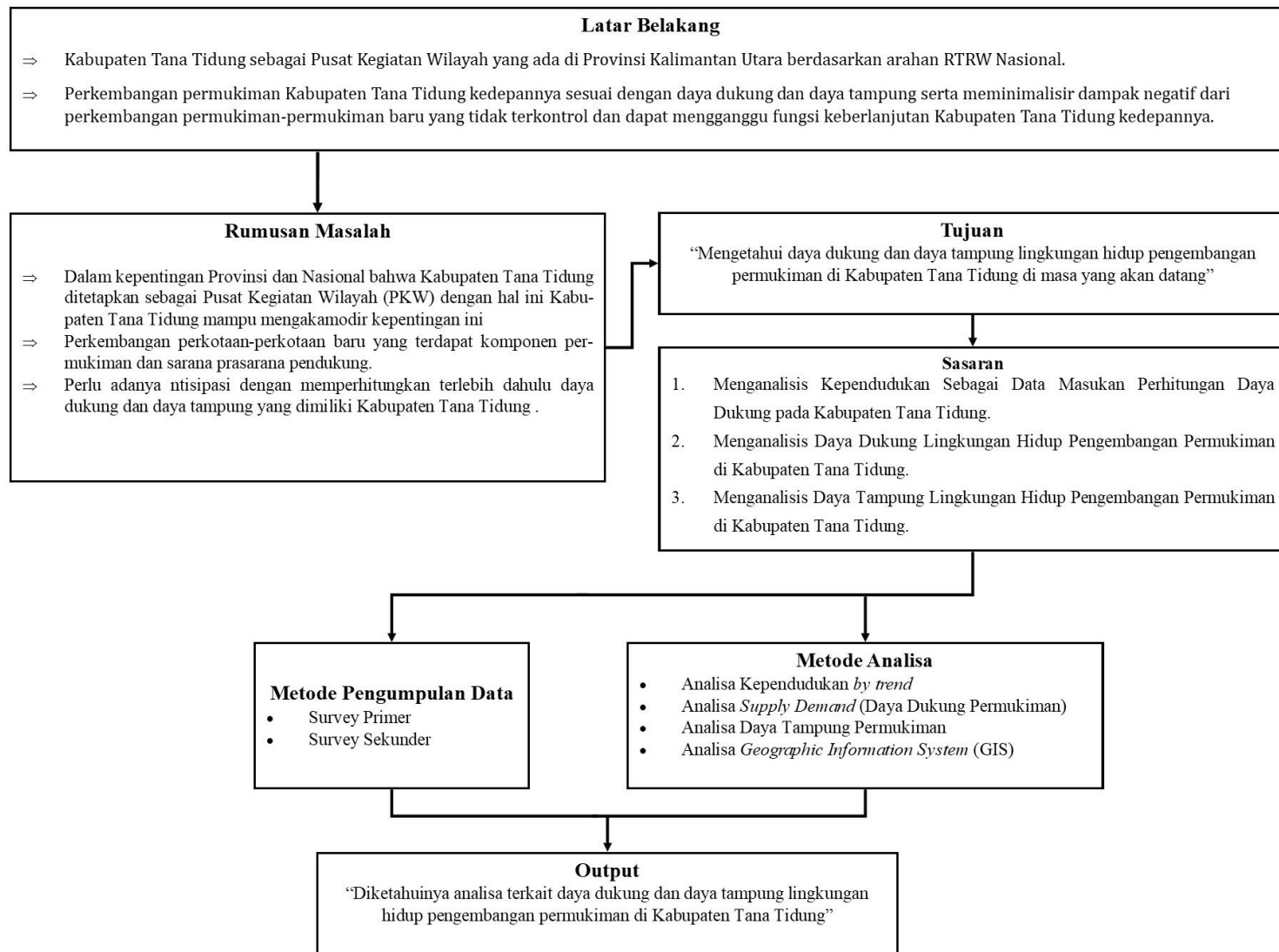
BAB II : Tinjauan Pustaka : bab ini mengulas teori yang akan digunakan dalam mendukung penelitian, yang terdiri dari teori : Teori Penggunaan Lahan, Teori Kependudukan, Teori permukiman, Teori Daya dukung dan daya tampung serta berisikan penelitian terdahulu dan landasan penelitian yang terdiri dari variabel penelitian dan definisi oprasional.

BAB III : Metode Penelitian : membahas terkait metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian tersebut seperti metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode pengambilan sampel.

- BAB IV :** Gambaran Umum : membahas mengenai gambaran secara umum pada lokasi penelitian serta membahas mengenai aspek fisik dan sosial yang berhubungan dengan tema dan lokasi penelitian.
- BAB V :** Analisa dan Pembahasan : memuat terkait pembahasan pada sasaran yang dirinci berdasarkan metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- BAB VI :** Penutup : membahas terkait kesimpulan dari tahap pengerjaan semua sasaran dan juga membahas mengenai rekomendasi yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan dan juga untuk menyempurnakan muatan penelitian dengan tema sama pada penelitian selanjutnya.



Peta 1.1 Administrasi Kabupaten Tana Tidung



Gambar 1.2 Kerangka Pikir